



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INSPEKTORAT

Jln Ketinggian GOR Singa Harau Sarilamak Kecamatan Harau
Telepon (0752) 7750555 - 7750655 Fax. (0752) 7750655
E-mail : inspektoratkab50kota@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 700/ 12 /Insp- LK / PA-VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2021

INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk lancarnya operasional Program dan Kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dirasa perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 ;
 12. Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota.
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 700/05/Insp-LK/PA-I/2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 ;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat / Pegawai yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan jabatan yang tersebut pada kolom 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
- I. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :**
- A. Tugas :**
- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepadanya baik administrasi maupun teknis sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- B. Tanggung Jawab :**
- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepadanya.
 - 2) Bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa.
 - 3) Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juni 2021 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 02 Juni 2021

Plt INSPEKTUR

SIHERMAN, SE

Pembina Tk. I NIP. 19681225 199703 1 005

Tembusan :

1. Bupati Lima Puluh Kota
2. Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota.
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 700/ 12 /Insp-LKPA-VI/2021
 TANGGAL 02 JUNI 2021
 TENTANG : PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL.	JABATAN DINAS	JABATAN PADA KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
	1. Nama : RIO PRESTO MALPEN, ST NIP. : 19830524 201001 1 001 Pangkat : Panata Gol. : III,c	Kasubag Perencanaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3 Administrasi Urum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ✓ - Penyediaan Peeralatan Rumah Tangga ✓ - Penyediaan Bahan Logistik Kantor ✓ - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan ✓ - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ✓ - Fasilitas Kunjungan Tamu ✓ - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ✓ 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat ✓ - Penyediaan Jasa Konsumsi Sumber Daya Air dan Listrik ✓ 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. ✓ - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya. ✓ 6 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu ✓

No.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL.	JABATAN DINAS	JABATAN PADA KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
2.	Nama : NASVI YARDI, SEME NIP. : 19830330 200901 1 003 Pangkat : Penata Gol. : III / c	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK)	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKP - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Perencanaan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran 3 Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan II. Program Penyelenggaraan Pengawasan 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja - Reriu Laporan Keuangan - Pengawasan Desa - Kefasanna Pengawasan Internal - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP III. Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi 1 Pendampingan dan Asistensi - Pandampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengegahan dan Pemberantasan Korupsi

No.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL.	JABATAN DINAS	JABATAN PADA KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
3	Nama : IRMA SURYANISE NIP. : 19821015 200604 2 012 Pangkat : Penata Gol. : III / c	Auditor Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK)	PROGRAM / KEGIATAN IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi 1. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
4	Nama : TRI OKTARINA, SE NIP. : 19781003 200604 2 012 Pangkat : Penata Gol. : III / c	Auditor Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK)	1. Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi 1. Pendampingan dan Asistensi - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
5	Nama : DAS APRIVUL PUTRAS, Sos NIP. : 19750424 200604 1 012 Pangkat : Penata Gol. : III / c	Auditor Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Atribut 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 02 Juni 2021

PILINSEKTUR

SUHERMAN, SE
 Pembina TK/1 / NIP. 19681225 199703 1 005